

Analisis Konsep Kekuasaan Dalam Teori Politik Dan Demokrasi

Bella Ayu Anzalia¹, Deo Agung Haganta Barus², Limra GM Nababan^{3,4,5}, Nur Hidayah Hasibuan⁴, Julia Ivanna⁵

¹⁻⁵Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia.

Email : llayunzalia.04@gmail.com¹, Deoagunghaganta@gmail.com², limranababan@gmail.com³,
nurhidayahhasibuan0325@gmail.com⁴

Abstract. *This research is to understand the concept of power in political and democratic theory. This research uses the method, In political theory, the concept of power refers to the ability of a person or group to influence the actions, decisions and behavior of other people. This concept is important in understanding how power is used and distributed in a political system. In political theory, power is understood as the ability to influence the actions and decisions of others, with various approaches, including as a resource or as a social relationship.*

Keywords: *Political Theory, Power*

Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui konsep kekuasaan dalam teori politik dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode, Dalam teori politik, konsep kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan, keputusan, dan perilaku orang lain. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana kekuasaan digunakan dan didistribusikan dalam suatu sistem politik. Dalam teori politik, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan yang mempengaruhi tindakan dan keputusan orang lain, dengan pendekatan yang beragam, termasuk sebagai sumber daya atau sebagai hubungan sosial.

Kata Kunci : Teori Politik, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan suatu kuasa, kedudukan, wewenang atau jabatan kemampuan untuk menguasai dan memiliki kekuatan yang dimiliki seseorang dengan mewujudkan tujuan-tujuan dengan mampu membuat peraturan dan bertanggung jawab terhadap wewenang yang di miliki. Kekuasaan yang dimiliki mampu mengarahkan dan membimbing bawahan untuk mengikuti dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Seorang yang memiliki kekuasaan harus memiliki wawasan yang luas sebagaimana untuk memajukan suatu kumpulan, kelompok organisasi, maupun negara.

Pada dasarnya kekuasaan selalu berhubungan dengan politik yang mempertahankan kekuasaan dari pemimpin-pemimpin daerah, anggota dewan, dan juga Pejabat-pejabat negara. banyak Kekuasaan yang dimiliki untuk mempertahankannya dibangunnya politik keluarga memiliki semuanya jabatan di suatu daerah tersebut. Sehingga peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh penguasa daerah dapat berjalan dan kekuasaan yang dimiliki dapat terjaga.

Untuk menjaga kekuasaan terjadinya perubahan dan perilaku buruk dengan mengurangi kebebasan berpendapat dan berserikat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat kesulitan untuk menemukan ketertiban dan keadilan. Menghilangkan peraturan-peraturan yang

merugikan kekuasaan dengan kerja sama yang keras. Mempertahankan kekuasaan di dunia politik yang terjadi Negara tidak akan menganut sistem pemerintahan demokrasi karena sistem demokrasi akan memberikan kebebasan-kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat dan berserikat.

Negara yang pada dasarnya memiliki peraturan yang berlaku dan wewenang untuk mendapatkan ketentraman dan keadilan bagi rakyatnya. Kekuasaan merupakan suatu wewenang seseorang disuatu negara yang mengatur suatu negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Dalam wacana politik, wacana kekuasaan hampir tidak pernah diabaikan dalam retrospeksi. Apalagi jika dikaitkan dengan demokrasi. Keduanya seperti jiwa dan roh saling melengkapi dan memiliki hubungan simbiosis satu sama lain. Kekuasaan dalam Perspektif Ilmu Politik sebenarnya mempunyai dua sisi. Kubu pertama berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah persoalan dalam politik. Sedangkan kubu kedua memandang kekuasaan sebagai isu penting dalam ilmu politik.

Mazhab yang pertama didasarkan pada asumsi bahwa terdapat isu yang lebih penting dan isu tersebut merupakan inti dari keseluruhan isu politik yaitu negara. Sementara. Kelompok kedua berpendapat bahwa kekuasaan adalah hal yang sangat penting dan esensial, dan bahkan hal ini merupakan inti dari ilmu politik. Negara hanyalah institusi kekuasaan. Kekuasaan di banyak tempat.

METODE

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

PEMBAHASAN

Politik berasal dari kata Yunani “politeia” yang berarti cara memerintah suatu kota (polis). Pada dasarnya politik adalah upaya ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengurusan urusan kemasyarakatan. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara untuk mencapai kebaikan bersama atau umum. Politik juga dapat diartikan sebagai pembentukan kekuasaan masyarakat yang antara lain mencakup proses pengambilan keputusan, khususnya dalam bernegara.

Dalam teori politik, konsep kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan, keputusan, dan perilaku orang lain. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana kekuasaan digunakan dan didistribusikan dalam suatu sistem politik.

Ada beberapa pendekatan dalam memahami kekuasaan dalam teori politik. Salah satunya adalah pendekatan kekuasaan sebagai sumber daya, di mana kekuasaan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi. Pendekatan ini menekankan pada kontrol atas sumber daya ekonomi, politik, dan sosial sebagai dasar kekuasaan.

Pendekatan lain adalah pendekatan kekuasaan sebagai hubungan sosial, di mana kekuasaan dipahami sebagai hasil dari hubungan antara aktor-aktor politik. Dalam pendekatan ini, kekuasaan tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur dan dinamika kelembagaan dan masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, konsep kekuasaan juga penting. Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, kekuasaan didistribusikan secara luas dan dijalankan melalui pemilihan umum dan partisipasi politik yang aktif.

Namun, demokrasi juga melibatkan kekuasaan untuk mencegah perlindungan dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia menjadi landasan dalam membatasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Dalam demokrasi, kekuasaan juga harus bertanggung jawab dan akuntabel. Pemimpin dan pemerintah harus akuntabel kepada rakyat dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Partisipasi politik, kebebasan pers, dan mekanisme pengawasan publik juga penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan dalam sistem demokrasi.

konsep kekuasaan dalam teori politik dan demokrasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan didistribusikan dalam sistem politik. Dalam demokrasi,

kekuasaan diberikan kepada rakyat dan dijalankan melalui mekanisme partisipasi politik yang aktif dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Varian yang mirip dengan kekuasaan politik adalah otoritas, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu berdasarkan otoritas yang diberikan oleh undang-undang atau kuasanya. Seorang polisi yang dapat menghentikan mobil di jalan bukan berarti ia mempunyai kekuasaan, tetapi ia mempunyai kewenangan yang berasal dari undang-undang lalu lintas. Oleh karena itu, apabila pemegang kekuasaan menggunakan kewenangannya bertentangan dengan kewenangan perintah yang diberikannya, maka ia telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga dapat dituntut dan dikenakan sanksi.

Kemauan akan kekuasaan adalah kondisi alamiah manusia, seperti yang dipikirkan Sartre dan Nietzsche. Menurut Sartre, kebutuhan dasar manusia harus dianggap penting dan dihormati. Pada saat yang sama, menurut Nietzsche, manusia selalu didorong oleh keinginan untuk menjadi manusia super dan kuat. Dalam konteks jabatan politik, mungkin keinginan alamiah manusia inilah yang mendorong seseorang untuk mencari kekuasaan politik. Menurut Lord Acton (Greenberg dan Baron, 2000), kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Banyak orang yang sudah mengetahui hal ini, terutama mereka yang menaruh perhatian pada praktik kekuasaan atau politik, baik di pemerintahan, korporasi, atau komunitas.

Di sisi lain, karena tujuan politik adalah mengatur dan mengendalikan urusan masyarakat. Politik juga bisa dijadikan alat untuk mengkomunikasikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang menjalani proses politik dan diberi amanah bekerja untuk rakyat adalah orang pertama yang mengkhianati amanah tersebut dengan mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya di atas kepentingan rakyat. Padahal, justru masyarakat yang bekerja di orbit politik, bukan politik itu sendiri, yang menciptakan stigma dan stigma bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan.

Secara terminologis, dalam uraian Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu rencana kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu dapat mengambil keputusan kompetitif atas nama rakyat. Sidney Hook menggambarkan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada persetujuan bebas mayoritas orang dewasa. Sedangkan menurut Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dari wakil-wakil yang mereka pilih, bertanggung jawab atas tindakan mereka di ruang publik.

Dalam banyak kasus, terutama dalam konteks demokrasi dan politik modern, konsep dan gagasan Al Maward sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Mungkin hanya beberapa bagian saja, seperti soal kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, serta soal pembagian wewenang di bawahnya. Namun wacana Al Maward tentang kegagalan teori demokrasi mempunyai bobot yang besar dan memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan politik Islam kontemporer. Dalam kajian teori politik, pengertian kekuasaan, demokrasi dan legitimasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang bergerak sangat dinamis di berbagai bidang.

Oleh karena itu, kajian mengenai kekuasaan, demokrasi, dan legitimasi harus memperhatikan aspek konteks, melihat latar belakang sosial dan politik dari perkembangan masing-masing teori. Penting untuk memperhatikan bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana diskusi mengenai kekuasaan berkembang. Dengan melihat berbagai perkembangan konsep power dan demokrasi maka rumusan tentang kekuasaan dalam konteks masyarakat modern juga dapat menghasilkan rumusan baru yang berangkat dari kasus yang sangat lokal namun bisa menjadi representasi internasional karena mewakili sebagai konsep yang membantah atau mendukung bahkan menambahi konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya

KESIMPULAN

Dalam perjalanan sejarah, konsep politik berasal dari kata Yunani “politeia,” yang merujuk pada cara memerintah suatu kota atau polis. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara untuk mencapai kebaikan bersama atau umum, yang melibatkan pembentukan kekuasaan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dalam negara. Dalam teori politik, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan yang mempengaruhi tindakan dan keputusan orang lain, dengan pendekatan yang beragam, termasuk sebagai sumber daya atau sebagai hubungan sosial. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan didistribusikan secara luas kepada rakyat, tetapi juga harus dijalankan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Meskipun demokrasi menciptakan mekanisme untuk mencegah kekuasaan, tantangan tetap ada. Terdapat dorongan alamiah manusia untuk mencari kekuasaan, yang dapat menyebabkan penyebab kekuasaan. Meskipun demikian, politik juga dapat menjadi alat untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus memahami perkembangan konsep kekuasaan, demokrasi, dan legitimasi sesuai dengan dinamika masyarakat modern dan konteks lokal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir B. Nambo & Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, 2005, Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik), Vol XXI No.2
- Patricia Dhiana Paramita, 2021, Keterikatan Antara Politik Dan Kekuasaan Dalam Organisasi, Jurnal Universitas Pandanaran
- Zusia Elly Triantini, 2019, Meta Konsep Kekuasaan ,POLITEA : Jurnal Kajian Polotik Islam, Vol 2 No. 2
- Aryoiati ArdiPandanto, 2014, Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo Dai.Am Meningkatkan Praktek Good Governace
- HM. Thalbah, 2009, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum
- Indar Arifin, 2019, Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, journal home page